

**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH ( LKjIP )  
TAHUN 2022**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN GROBOGAN  
2023**

## **KATA PENGANTAR**

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan tuntutan masyarakat sejalan dengan era reformasi dan perkembangan ekonomi, politik, sosial budaya dan harapan bagi kualitas hidup masyarakat. Dalam era reformasi, maka pemerintah sesuai tugasnya sebagai pelayanan publik dan motor penggerak pembangunan serta aktifitas pemberdayaan harus selalu melakukan pelayanan prima dan transparan.

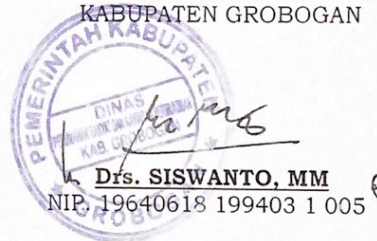
Dari pemikiran tersebut diatas, dalam menjalankan roda pemerintahan khususnya di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan, maka dibutuhkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan visi dan perencanaan strategis yang ada. Adapun visi dan perencanaan strategis bertujuan memberikan arah dan fokus strategis yang jelas dan berkesinambungan, transparan, kredibel serta melaksanakan evaluasi kerja untuk perbaikan pelaksanaan dimasa yang akan datang.

Media informasi bentuk akuntabilitas diimplementasikan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ). Buku ini merupakan buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan selama periode Tahun Anggaran 2022. Dengan disusunnya laporan ini dimaksudkan untuk mendorong

kinerja instansi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022 yang lebih baik dan terpercaya menuju pemerintahan dan pembangunan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Demi kesempurnaan dokumen ini, kami sangat mengharapkan saran, kritik dan masukan dari berbagai pihak. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua, serta semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

KEPALA DINAS  
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN GROBOGAN



**Drs. SISWANTO, MM** p  
NIP. 19640618 199403 1 005

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iv
Ikhtisar Eksekutif.....	1
Bab I. Pendahuluan.....	2
Bab II. Perencanaan Kinerja.....	18
Bab III. Akuntabilitas Kinerja tahun 2022.....	22
BAB IV. Penutup.....	58

## IKHTISAR EKSEKUTIF

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2022 disusun berdasarkan Rencana Strategis 2021 – 2026 dan Rencana Kerja Tahun 2022.*

*Adapun Capaian Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2022 tampak sebagai berikut :*

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2021 (%)	Target 2022 (%)	Realisasi 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatkan pemenuhan rumah layak huni yang terjangkau; akses air minum dan air limbah yang layak dan aman serta tertib administrasi pertanahan	Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni			75,03	75,86	75,93
			Meningkatnya rumah layak huni dan kualitas lingkungan permukiman	Persentase rumah layak huni	63,14	63,16	63,62
				Persentase kawasan kumuh	0,334	0,054	0,083
			Meningkatnya pemenuhan akses air minum dan air limbah yang layak dan aman	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/ kota	85,09	86,20	86,68
				Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestk	76,87	78,57	77,50
	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Persentase lahan PSU yang sudah diserahkan pengembang ke Pemda yang disertifikatkan	13,00	0,00	13,00		

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan sebagai instansi penyelenggaraan pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan selaku salah satu perangkat daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dengan tujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai. Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang:

1. Uraian singkat organisasi;
2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
3. Pengukuran kinerja;
4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program / kegiatan;

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2022 ini merupakan wujud pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan kebijakan teknis, pengelolaan dan pembangunan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan demi terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Selain itu, laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang mengacu kepada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2026.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Laporan ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja baik dalam bentuk regulasi, distribusi maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan. Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan adalah untuk :

1. Memberikan informasi capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya;

2. Memberikan bahan evaluasi sebagai masukan untuk peningkatan akuntabilitas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan;
3. Sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan;
4. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsive sehingga dalam menjalankan tugas dan perannya dapat sesuai dengan prinsip prinsip tata pemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama Tahun 2022.
5. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang;

### **C. Landasan Hukum**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2022 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Bupati Grobogan No. 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Grobogan.
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.

**D. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan**

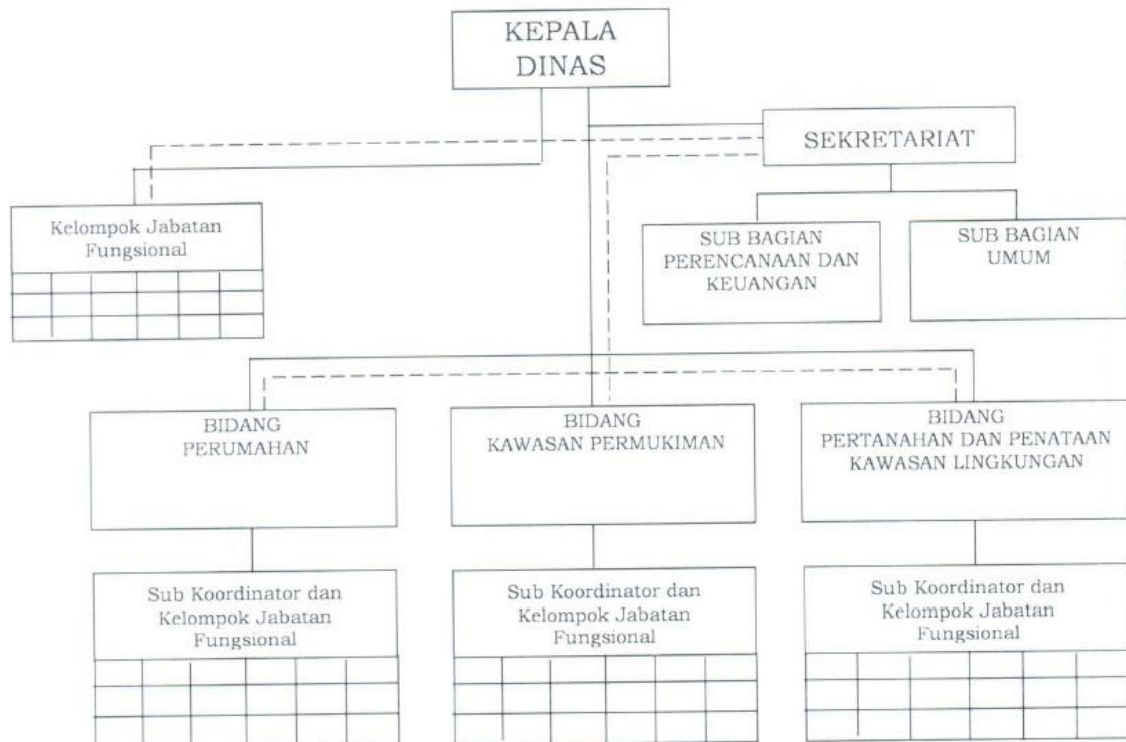
Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.

Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawahkan:
  - a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - b) Sub Bagian Umum.
3. Bidang Perumahan, membawahkan:
  - a) Sub Koordinator Perencanaan dan Penyediaan Prasarana Perumahan;
  - b) Sub Koordinator Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan;
  - c) Sub Koordinator Pemantauan dan Evaluasi Perumahan.
4. Bidang Kawasan Permukiman, membawahkan:
  - a) Sub Koordinator Perencanaan dan Penyediaan Prasarana Permukiman;
  - b) Sub Koordinator Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
  - c) Sub Koordinator Pemanfaatan Kawasan Permukiman.
5. Bidang Pertanahan dan Penataan Kawasan Lingkungan, membawahkan :
  - a) Sub Koordinator Pertanahan;
  - b) Sub Koordinator Perencanaan dan Penyediaan Prasarana Kawasan Lingkungan;
  - c) Sub Koordinator Pemantauan, Evaluasi Pertanahan dan Kawasan Lingkungan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Struktur organisasi organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

**Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi  
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Grobogan**



**E. Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan**

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat dan

kawasan permukiman dan pertanahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut dan fungsi dari masing-masing komponen struktur dijabarkan sebagai berikut :

### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan;
- b) Pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan;
- c) Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan;
- d) Pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan;
- e) Pengelolaan kesekretariatan dinas; dan
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

## **2. Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dengan menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas, menyelenggarakan administrasi umum, surat-menyurat, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan serta penyusunan perencanaan program dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan Dinas;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas ketatausahaan, administrasi umum dan surat-menyurat;
- d. Pengelolaan kepegawaian, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan dinas, hukum, kearsipan, pengelolaan perencanaan program dan penyusunan pelaporan;
- e. Pengelolaan keuangan, perjalanan dinas dan pertanggungjawaban keuangan;

- f. Penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional;  
dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

### **3. Bidang Perumahan**

Kepala Bidang Perumahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan dan pembiayaan rumah umum dan rumah swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Perumahan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan dan pembiayaan rumah umum dan rumah swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan dan pembiayaan rumah umum dan rumah swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan dan pembiayaan rumah

umum dan rumah swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan;

- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan dan pembiayaan rumah umum dan rumah swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan dan pembiayaan rumah umum dan rumah swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Bidang Kawasan Permukiman**

Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan, pemberian rekomendasi dan fasilitasi teknik, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan di bidang pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas

- perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
  - c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
  - d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
  - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **5. Bidang Pertanahan dan Penataan Kawasan Lingkungan**

Kepala Bidang Penataan Bangunan Gedung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan standar, pedoman, kebijakan

pelaksanaan di bidang pertanahan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan/ perkotaan serta kawasan ibu kota kecamatan, perencanaan teknis dan pelaksanaan di bidang pertanahan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan/ perkotaan dan kawasan ibu kota kecamatan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pertanahan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan/ perkotaan dan kawasan ibu kota kecamatan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Pertanahan dan Penataan Kawasan Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan dan penataan kawasan lingkungan;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pertanahan dan penataan kawasan lingkungan;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pertanahan dan penataan kawasan lingkungan;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pertanahan dan penataan kawasan lingkungan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pertanahan dan penataan kawasan lingkungan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **6. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas terdiri dari sejumlah pejabat fungsional jenjang keterampilan dan/ atau jenjang keahlian, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pejabat Fungsional yang mendapat tugas tambahan sebagai Sub Koordinator dalam menjalankan tugasnya bekerja secara individu dan/ atau tim kerja, ditunjuk oleh Kepala Dinas dengan mendayagunakan Pejabat Fungsional sesuai dengan kompetensi dan dapat berasal dari Jabatan Fungsional sejenis atau berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada Dinas atau di Luar Dinas untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi.

**F. Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan**

Sumber daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan terdiri dari sumber daya manusia (pegawai) dan sumber daya asset. Masing-masing sumber daya tersebut dijelaskan melalui uraian di bawah ini.

**1. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam mencapai kinerja birokrasi. Kualitas SDM yang baik akan mampu mendorong percepatan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Komposisi jumlah pegawai di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Grobogan tercatat sejumlah 57 orang dengan rincian, 22 orang ASN dan 35 orang Pegawai kontrak dengan perjanjian kerja (Non ASN).

Komposisi jumlah pegawai diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022**

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	Sekolah Dasar	1	0	0	0	1
2	SMP	1	0	0	0	1
3	SMA	0	2	6	2	10
4	Diploma 3 / D3	0	0	1	2	3
5	Starata 1/ S1	6	5	16	7	34
6	Strata 2/ S2	6	1	0	1	8
	<b>Jumlah Total</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>57</b>

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Grobogan, 2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan cenderung cukup baik. Hal ini dapat dilihat dengan presentase pegawai yang berpendidikan sarjana/ S1 sebesar 59,64 % (34 orang). Sedangkan Pegawai dengan pendidikan pasca sarjana/ S2 sebanyak 8 orang atau sebesar 14.03 %.

Berdasarkan golongan terdapat 1 (satu) orang dengan golongan I; 3 (tiga) orang dengan golongan II; 11 (sebelas) orang dengan golongan III dan 7 (tujuh) orang golongan IV. Selengkapnya jumlah pegawai berdasarkan golongan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Golongan</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	Golongan IV	6	1	7
<b>2</b>	Golongan III	7	4	11
<b>3</b>	Golongan II	1	2	3
<b>4</b>	Golongan I	1	0	1
	<b>Jumlah Total</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>22</b>

*Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Grobogan, 2022*

## 2. Sumber Daya Aset

Sumber daya aset prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut.

*Tabel 1.3  
Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Grobogan Tahun 2022*

No	Nama/ Jenis Aset	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak	Rusak Berat
1	Sepeda Motor	12	12		
2	Global Positioning System (GPS)	13	13		
3	Laser Meter Digital	4	4		
4	Alat Ukur Theodolite	2	2		
5	Hammer Test	2	2		
6	Waterpass Digital	2	2		
7	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	1	1		
8	Mesin Pemotong Rumput	1	1		
9	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	2	2		
10	Mesin Ketik Listrik Standar	1	1		
11	Lemari Besi	5	5		
12	Rak Besi/Metal	8	8		
13	Rak Kayu	3			3
14	Filling Besi/Metal	2	7		
15	White Board	2	2		
16	Overhead Projektor	1	2		
17	Layar Proyektor/Screen	1	1		
18	Lemari Kayu	13	13		
19	Rak Kayu	2	2		
20	Meja Kayu/Rotan	51	45		6
21	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	14	1		13
22	Meja Rapat	15			
23	Kursi Rapat		19		37
24	Kursi Tamu	1	1		
25	Kursi Putar	19	2		2
26	Kursi Biasa	18			18
27	Kursi Lipat		110		36
28	Meja Komputer	2	2		
29	Meja Tamu	1	1		
30	Mesin Potong Rumput	1	1		
31	Tempat Sampah	470			470
32	AC Split	1	1		

No	Nama/ Jenis Aset	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak	Rusak Berat
33	AC Split	10	10		
34	AC Split	4	4		
35	AC Split	4	4		
36	Kipas Angin	1			1
37	Kipas Angin	4	4		
38	Exhause Fan	5	5		
39	Televisi	1	1		
40	Sound System	1	1		
41	Wireless	1	1		
42	Unit Power Supply	5			5
43	Unit Power Supply	9	9		
44	Alat Hiasan/Gorden	20	20		
45	Tangga Alumunium	2	2		
46	Dispenser	3	2		1
47	Mimbar/Podium	1	1		
48	Gergaji Mesin/Chainsaw	2	2		
49	Alat Pemadam Portable	8	8		
50	Mainframe	1	1		
51	Personal Computer Unit (P.C)	39	35		4
52	Lap Top	5	2		3
53	Note Book	42	40		2
54	Ipad/Komputer Tablet	2	2		
55	Monitor	2	2		
56	Printer	64	58		6
57	Meja Kerja Pejabat Eselon III	9	9		
58	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	7	7		
59	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	35			35
60	Meja Tamu Ruangan Biasa	1	1		
61	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	11	11		
62	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2	2		
63	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1	1		
64	Camera + Attachment	17	17		
65	Layar Proyektor/Screen	1	1		
66	Handycam	5	5		
67	Camera Electronic	4	3		1
68	Handy Talky	6	6		
69	Facsimile	1	1		
70	Box Telephone	1	1		

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Grobogan, 2022

## **G. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2022 dibagi per bidang tugas sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.

### **1. Sekretariat**

Sumber Daya Aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan yang ada sampai dengan akhir tahun 2022 masih belum memadai secara kuantitas maupun kualitasnya dibandingkan luasnya cakupan layanan bidang perumahan, permukiman dan pemanfaatan ruang.

Jumlah staf teknis dimasing masing bidang masih sangat terbatas. Bidang Pertanahan dan Penataan Kawasan Lingkungan hanya terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Bidang, 1 (satu) orang Sub Koordinator dan 1 (satu) orang Staf yang mempunyai latar belakang pendidikan teknis. Bidang Perumahan terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Bidang, 1 (satu) orang Sub Koordinator dan 2 (dua) orang Staf yang mempunyai latar belakang pendidikan teknis. Bidang Kawasan Permukiman terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Bidang, 2 (dua) orang Sub Koordinator dan 3 (tiga) orang Staf yang mempunyai latar belakang pendidikan teknis.

Keterbatasan jumlah staf teknis ini tidak sebanding dengan cakupan layanan bidang tugasnya. Untuk membantu pelaksanaan tugas teknis tersebut, dibantu tenaga honorer/tenaga harian lepas

yang berlatar belakang pendidikan teknis pula. Akan tetapi secara struktural mereka terkendala peraturan perundangan yang ada.

Kondisi kurangnya sumber daya aparatur ini menjadi sulit untuk dipecahkan ketika Pemerintah menerapkan aturan moratorium pegawai. Di sisi lain, perkembangan peraturan perundangan terkait bidang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan menjadi suatu permasalahan pula ketika tingkat keahlian dan keterampilan dari masing masing karyawan tidak merata. Hal ini berakibat terhambatnya kinerja penatalaksanaan administrasi, penyusunan perencanaan, pendataan dan pelaporan capaian program dan kegiatan.

## **2. Bidang Perumahan**

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan telah menangani peningkatan kualitas rumah layak huni di Kabupaten Grobogan yang sumber dananya dari APBN dengan program BSPS, DAK (Dana Alokasi Khusus), Bantuan Keuangan Provinsi, APBD Kabupaten Grobogan, dan juga dana CRS (*Corporate Social Responsibility*) Perusahaan yang memiliki komitmen dalam program pengentasan kemiskinan. Namun karena jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Grobogan yang relatif besar sehingga target peningkatan kualitas rumah layak huni yang direncanakan masih rendah yaitu 0,02% di tahun 2022.

### **3. Bidang Kawasan Permukiman**

Persentase kawasan kumuh pada tahun 2022 ditargetkan berkurang sebesar 0,054% atau menjadi 0,388% dari luasan kumuh berdasarkan SK Bupati Grobogan Nomor 050/921/2020 yaitu sebesar 120,79 Ha. Sedangkan persentase pemenuhan akses air minum dan air limbah yang layak dan aman diharapkan dapat mencapai angka 82,38%.

### **4. Bidang Pertanahan dan Penataan Kawasan Lingkungan**

Bidang Pertanahan dan Penataan Kawasan Lingkungan merupakan bidang baru dengan terbitnya Peraturan Bupati Grobogan No. 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan pada tanggal 30 Desember 2021. Bidang melaksanakan 3 program, 3 kegiatan dan 3 kegiatan terkait bidang pertanahan.

Kinerja peningkatan tertib administrasi pertanahan dimaksud berupa persentase kemajuan lahan PSU yang sudah diserahkan pengembang ke Pemda yang disertifikatkan. Dari 23 perumahan yang ada di Kabupaten Grobogan, terdapat 3 perumahan yang telah diserahkan dan disertifikatkan yaitu Perumahan Pondok Grobogan Asri, Perumahan Sambak Indah (RSS) Danyang, dan Perumahan Ayodya Bersemi 1 Putat, dimana

sertifikat PSU tersebut dilaksanakan oleh BPPKAD dan terbit pada tahun 2021.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. PENGERTIAN PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan Kinerja berkaitan dengan Perjanjian Kinerja, dimana suatu kegiatan sebelum dilaksanakan harus sudah jelas dahulu rincian kerja yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut. Perjanjian kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun – tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJMD) 2021 - 2026 Kabupaten Grobogan yang berdasar pada visi-misi Kabupaten Grobogan. Penyelenggaraan Program dan Kegiatan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan dilaksanakan merupakan kegiatan lanjutan dan pendukung terhadap pencapaian Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan. Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan sesuai dengan Visi Bupati/Wakil Bupati Grobogan adalah

**“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera,  
Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya”**

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas maka Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan menetapkan misi-misinya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing;
2. Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana;
3. Memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing;
4. Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik;
5. Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian visi dan misi di atas, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mendukung misi nomor 2 yaitu **Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana.**

## **B. TUJUAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA**

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja pemberi amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

## **C. WAKTU PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian kinerja disusun suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, setelah paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

## **D. ISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

### **1. Sasaran Strategis**

Sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya rumah layak huni dan kualitas lingkungan permukiman;***
- b. Meningkatnya pemenuhan akses air minum dan air limbah yang layak dan aman;***
- c. Meningkatnya tertib administrasi pertanahan;***

Adapun indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Persentase peningkatan rumah layak huni dan penurunan kawasan kumuh;
- b. Presentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum dan layanan pengolahan air limbah domestik;
- c. Persentase lahan PSU yang sudah diserahkan pengembang kepada Pemda yang disertifikatkan;

Indikator tersebut diatas dituangkan ke dalam perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan dengan Bupati Grobogan sebagaimana terdapat dalam **Lampiran 1**.

## **2. Program Kegiatan**

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2022 ini diaktualisasikan dengan program – program sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Program Pengembangan Perumahan;
5. Program Kawasan Permukiman;
6. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;
7. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
8. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan;
9. Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee;
10. Program Penataangunaa Tanah.

## **E. RINGKASAN TOTAL ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2022**

*Tabel 2.1*  
*Ringkasan Total Anggaran Per Program Tahun 2022*  
*Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman*  
*Kabupaten Grobogan*

<b>NO</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>SUMBER DANA</b>
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	7.271.748.000	DAK dan DAU
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	7.271.748.000	
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	9.387.139.000	DAK dan DAU
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.387.139.000	
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman</b>			
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.525.777.000	DAU
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000	

<b>NO</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>SUMBER DANA</b>
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.733.596.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	151.700.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	626.878.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	175.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	362.930.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	460.673.000	
4	Program Pengembangan Perumahan	75.000.000	DAU
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	25.000.000	
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	50.000.000	
5	Program Kawasan Permukiman	1.437.933.000	APBD
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	100.000.000	
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	50.000.000	
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.287.933.000	
6	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	7.500.000.000	DAU
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	7.500.000.000	
7	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	15.748.009.000	DAU
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	15.748.009.000	
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan</b>			
8	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	100.000.000	DAU
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	
9	Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100.000.000	DAU
	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan	100.000.000	

<b>NO</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>SUMBER DANA</b>
	Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
10	Program Penatagunaan Tanah	100.000.000	DAU
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	
<b>Jumlah</b>		<b>46.195.606.000</b>	

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

##### **1. Target dan Realisasi Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2022**

Pengukuran capaian kinerja organisasi dilakukan dengan menyajikan capaian atas target kinerja setiap sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun rincian-rincian kinerja setiap sasaran dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

##### **a. Target dan Realisasi Tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 ;**

*Tabel 3.1*  
*Target dan Realisasi Tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2022*

<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kondisi Awal 2021</b>	<b>Target 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>
1.	Persentase pemenuhan air minum; sanitasi dan rumah layak huni	75,03%	75,86%	75,93%

**b. Target dan Realisasi Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 ;**

**Tabel 3.2**  
**Target dan Realisasi Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kondisi Awal 2021</b>	<b>Target 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>
1	Persentase rumah layak huni	63,14 %	63,16 %	63,62 %
2	Persentase kawasan kumuh	0,334 %	0,054 %	0,083 %
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota	85,09 %	86,20 %	86,68 %
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	76,87 %	78,57 %	77,50 %
5	Persentase lahan PSU dari pengembang yang disertifikatkan	13 %	0 %	13 %

**c. Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2022;**

1) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

**Tabel 3.3**  
**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**  
**Tahun 2022**

<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>						
<b>No</b>	<b>Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Target 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Capaian Kinerja 2022</b>
1	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	Jumlah Pembangunan/ peningkatan/ perbaikan SPAM	30 lokasi	30 lokasi	83,69%
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM		Dokumen DED SPAM yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang terbangun	14 lok. (DAK) 5 lok. (HAMP) 3 lok. (Desa)	14 lok. (DAK) 5 lok. (HAMP) 3 lok. (Desa)	100%
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang ditingkatkan	5 lokasi (PAMSIMAS)	5 lokasi (PAMSIMAS)	100%
	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang diperbaiki	3 lokasi (SPAM BM)	3 lokasi (SPAM BM)	100%

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 7.271.748.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.947.858.000,- atau 95,55 %. Dengan realisasi kegiatan sebagai berikut:

- (1) Terlaksananya Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM, dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100%;
- (2) Terlaksananya Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100%;
- (3) Terlaksananya Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100%;
- (4) Terlaksananya Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100%;

2) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

**Tabel 3.4**  
**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah**  
**Tahun 2022**

<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>						
<b>No</b>	<b>Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Target 2021</b>	<b>Realisasi 2021</b>	<b>Capaian Kinerja 2021</b>
1	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	Jumlah unit dan cakupan kegiatan Hibah Air Limbah Setempat	500 SR	500 SR	100%
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat		Jumlah pembangunan sanitasi air limbah setempat individu	500 unit	500 unit	100%

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 9.387.139.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.963.189.000,- atau 95,48 %. Dengan realisasi kegiatan sebagai berikut:

- (1) Terlaksananya Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100 %;
- (2) Terlaksananya Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat, dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100%;

3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

**Tabel 3.5**  
**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022**

<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						
<b>No</b>	<b>Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Target 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Capaian Kinerja 2022</b>
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Cakupan pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%	100%	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	- Dokumen Renstra - Dokumen Renja - Dokumen RKT - Dokumen RKA - Dokumen DPA - Dokumen Perjanjian Kinerja	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan	- Dokumen LKjIP	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang tersedia	- Dokumen Evaluasi RKPD - Dokumen Sakip dan PMPRB	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	100%
2	<b>Administrasi</b>	Cakupan	Persentase pemenuhan	100%	100%	100%

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja 2022
	<b>Keuangan Perangkat Daerah</b>	pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	tata laksana administrasi keuangan perangkat daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	100%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah honor administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah laporan laporan bulanan/triwulanan/se mesteran SKPD (RFK, Rekon Aset, Laporan Keuangan)	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase peningkatan kapasitas SDM	25%	25%	100%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Karyawan Yang Mengikuti Pelatihan	Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan Jumlah kegiatan pelatihan	49 orang 3 kali	49 orang 3 kali	100%

<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						
<b>No</b>	<b>Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Target 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Capaian Kinerja 2022</b>
4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan tata laksana administrasi umum perkantoran	100%	100%	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah lampu HE 18 Watt</li> <li>- Lampu Bohlam 25 Watt</li> <li>- Lampu LED Low Grade</li> </ul>	30 buah 30 buah 13 buah	30 buah 30 buah 13 buah	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah makan dan snack rapat yg tersedia	1.880 dos 2.160 dos	1.880 dos 2.160 dos	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kartu Kendali yang tercetak</li> <li>- Penggandaan</li> </ul>	35 buku 42.260 lb.	35 buku 42.260 lb.	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Langganan Surat Kabar dan Majalah	112 eks.	112 eks.	100%
	Penyediaan Bahan/Material		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isi Ulang Printer Toner</li> <li>- Jumlah Kertas HVS yang tersedia</li> </ul>	100 kali 1.175 rim	100 kali 1.175 rim	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Frekuensi pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah	206 OK 300 OK	206 OK 300 OK	100%

<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						
<b>No</b>	<b>Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Target 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Capaian Kinerja 2022</b>
5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan pengadaan BMD penunjang perangkat daerah	100%	100%	100%
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas yang diadakan untuk dihibahkan ke BPN/ Kantor Pertanahan	1 unit	1 unit	100%
6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan tata laksana administrasi perkantoran	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah kebutuhan surat menyurat yang tersedia	3.000 surat	3.000 surat	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapasitas Jasa Langganan Internet dan Telepon</li> <li>- Kapasitas jasa langganan listrik</li> <li>- Kapasitas jasa langganan PDAM</li> </ul>	12 bulan 112.000 kWh 980 m3	12 bulan 112.000 kWh 980 m3	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Tenaga Harian Lepas Administrasi Keuangan</li> <li>- Penyediaan THL</li> </ul>	6 orang	6 orang	100%

<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						
<b>No</b>	<b>Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Target 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Capaian Kinerja 2022</b>
			Penjaga Kantor, Kebersihan, dan Pengemudi	4 orang, 2 orang, 1 orang	4 orang, 2 orang, 1 orang	
7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD penunjang perangkat daerah	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah unit kendaraan dinas yang dirawat secara rutin/ berkala	17 unit kendaraan	17 unit kendaraan	100%
	Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		- Jumlah bangunan gedung kantor yang direhabilitasi/ direnovasi - Jumlah prasarana bangunan gedung kantor yang direnovasi	1 unit  1 unit	1 unit  1 unit	100%
	Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		- Jumlah AC yang dipelihara - Jumlah printer yang dipelihara	17 unit  6 unit	17 unit  6 unit	100%

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.525.777.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.469.571.915,- atau 98,76%. Dengan realisasi kegiatan sebagai berikut:

- (1) Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100 %;
- (2) Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100 %;
- (3) Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100 %;
- (4) Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100 %;
- (5) Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100 %;
- (6) Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100 %;
- (7) Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100 %.

#### 4) Program Pengembangan Perumahan

**Tabel 3.6**  
**Program Pengembangan Perumahan Tahun 2022**

<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>						
<b>No</b>	<b>Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Target 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Capaian Kinerja 2022</b>
1	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	Cakupan pemenuhan data rumah pada kawasan rawan bencana	Presentase data rumah pada kawasan rawan bencana	42,11 %	42,11 %	100%
	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana yang dilakukan	1 dokumen	1 dokumen	100%
2	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	Cakupan pemenuhan pelayanan pembangunan atau rehabilitasi rumah korban bencana	Presentase rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100 %	100 %	100%
	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana		Jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi	10 unit	10 unit	100%

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 74.990.000,- atau 99,99%. Dengan realisasi kegiatan sebagai berikut:

- (1) Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100 %;
- (2) Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100 %.

## 5) Program Kawasan Permukiman

**Tabel 3.7**  
**Program Kawasan Permukiman Tahun 2022**

<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>						
<b>No</b>	<b>Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Target 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Capaian Kinerja 2022</b>
1	<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>	Cakupan pelayanan izin pembangunan & pengembangan kawasan permukiman	Persentase izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang diterbitkan	100 %	100 %	100%
	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh		Perbup kawasan kumuh yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	100%
2	<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	31 %	31 %	100%
	Penyusunan/ Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP		Jumlah dokumen legalisasi kebijakan PKP yang disusun/ direview	1 dokumen	1 dokumen	100%

3	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	31 %	31 %	100%
	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh		Jumlah dokumen site plan/DED peremajaan/pemugaran permukiman kumuh yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		Jumlah RTLH di kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang diperbaiki	51 unit	51 unit	100%

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.437.933.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.414.060.000,- atau 98,34%. Dengan realisasi kegiatan sebagai berikut:

- (1) Terlaksananya Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman, dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100 %;
- (2) Terlaksananya Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100 %;
- (3) Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100 %.

6) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

**Tabel 3.8**  
**Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Tahun 2022**

<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>						
<b>No</b>	<b>Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Target 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Capaian Kinerja 2022</b>
1	<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>	Cakupan penanganan pembangunan Rumah Layak Huni	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	1,68 %	1,68 %	100%
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Jumlah RTLH yang diperbaiki	476 unit	476 unit	100%

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 7.500.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.493.239.000,- atau 99,91%. Dengan realisasi kegiatan sebagai berikut:

- (1) Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota, dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100 %.

7) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

**Tabel 3.9**  
**Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Tahun 2022**

<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>						
<b>No</b>	<b>Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Target 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Capaian Kinerja 2022</b>
1	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	Cakupan penataan lingkungan yang layak untuk menunjang fungsi hunian	Persentase PSU perumahan yang telah diserahkan ke Pemerintah daerah	20,83 %	20,83 %	100%
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Pebup Penyerahan PSU</li> <li>- Sertifikasi PSU Perumahan</li> <li>- Penyusunan Kajian kawasan tematik</li> <li>- Penyusunan Perbup Jalan Lingkungan</li> </ul>	1 dokumen 21 lokasi 1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 21 lokasi 1 dokumen 1 dokumen	100%
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Panjang drainase &amp; jalan lingkungan yang dibangun</li> <li>- Panjang drainase &amp; jalan lingkungan yang dipelihara</li> </ul>	2.252 m 416.539 m	2.252 m 416.539 m	100%

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 15.748.009.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.219.602.502,- atau 96,64%. Dengan realisasi kegiatan sebagai berikut:

- (1) Terlaksananya Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100 %.

8) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

**Tabel 3.10**

**Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Tahun 2022**

<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>						
<b>No</b>	<b>Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Target 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Capaian Kinerja 2022</b>
1	<b>Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Persentase penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100 %	100 %	100%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah koordinasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 46.905.000,- atau 93,81%. Dengan realisasi kegiatan sebagai berikut:

- (1) Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100 %.

9) Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

**Tabel 3.11**

**Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Tahun 2022**

<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>						
<b>No</b>	<b>Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Target 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Capaian Kinerja 2022</b>
1	<b>Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Persentase subjek dan objek redistribusi tanah yang ditetapkan	100 %	100 %	100%
	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim Monev/ Pendampingan PTSL yang terbentuk</li> <li>- Siteplan kawasan perkantoran yang tersusun</li> </ul>	1 kegiatan  1 dokumen	1 kegiatan  1 dokumen	100%

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 98.890.000,- atau 98,89%. Dengan realisasi kegiatan sebagai berikut:

- (1) Terlaksananya Kegiatan Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah, dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100 %.

## 10) Program Penatagunaan Tanah

**Tabel 3.12**  
**Program Penatagunaan Tanah Tahun 2022**

<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>						
<b>No</b>	<b>Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Target 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Capaian Kinerja 2022</b>
1	<b>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Persentase peta asset tanah eks bondo desa di kelurahan yang tersusun	100 %	100 %	100%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah		Jumlah peta asset tanah eks bondo desa di 7 kelurahan yang tersusun Jumlah sosialisasi hokum pertanahan	1 dokumen  2 kegiatan, 40 orang	1 dokumen  2 kegiatan, 40 orang	100%

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 98.920.000,- atau 98,92%. Dengan realisasi kegiatan sebagai berikut:

- (1) Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah, dengan realisasi fisik dan kualitas fisik sebesar 100%.

**2. Target dan Realisasi RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021 sd. 2026 yang menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2022**

*Tabel 3.13  
Target dan Realisasi RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021 sd. 2026 yang menjadi Indikator Kinerja Daerah  
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2022*

No	Indikator	Sat	Kondisi awal 2020	Target RPJMD						Realisasi RPJMD					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase rumah layak huni	%	62,54	62,88	63,16	63,44	63,72	64,00	64,28	63,16	63,62				
2	Persentase pemenuhan air minum dan sanitasi rumah tangga	%	74,25	74,76	75,86	75,97	76,07	76,18	76,28	80,98	82,09				
3	Persentase lahan PSU yang sudah diserahkan pengembang ke Pemda yang disertifikatkan	%	0,00	0,00	0,00	23,08	46,15	76,92	100	13,00	13,00				

Dari tabel 3.13 tersebut menunjukkan pencapaian target dari masing - masing Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan menunjukkan hasil yang sangat baik dengan pencapaian di atas 100%.

Persentase lahan PSU yang sudah diserahkan pengembang ke Pemda yang disertifikatkan untuk tahun 2022 sama dengan kondisi tahun sebelumnya yaitu 13%. Hal ini berarti di tahun 2022 tidak ada sertifikat PSU Perumahan yang terbit, dikarenakan pensertifikatan PSU Perumahan baru mendapatkan alokasi anggaran pada perubahan APBD TA 2022 (bulan September 2022), sedangkan pensertifikatan tanah membutuhkan proses yang panjang yaitu mulai dari pendaftaran, pengukuran, penerbitan peta bidang tanah, penetapan hak tanah, sampai dengan pembayaran biaya penerimaan Negara bukan pajak sebagai dasar penerbitan sertifikat. Proses pensertifikatan tanah 4 (empat) unit PSU Perumahan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan yaitu 1. **Ayodya Bersemi** Dusun Penganten Desa Putat Kec. Purwodadi, 2. **Griya Wijaya Sartika** Desa Godong Kec. Godong, 3. **Gubug Permai** Jl. Raya Purwodadi-Semarang Desa Gubug Kec. Gubug, 4. **Petra Griya Indah** Jl. Gajah Mada Kelurahan Purwodadi Kec. Purwodadi; sampai dengan akhir tahun 2022 telah terbit Peta Bidang Tanah (PBT) namun masih menunggu penetapan hak tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan.

## 2. Realisasi Anggaran Tahun 2022

*Tabel 3.14*  
*Realisasi Program dan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2022*

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi		
			Keuangan		Fisik
			Rp.	%	%
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	16.658.887.000	15.911.047.000	95,51	100,00
1	<b>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</b>	7.271.748.000	6.947.858.000	95,55	100,00
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	7.271.748.000	6.947.858.000	95,55	100,00
2	<b>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah</b>	9.387.139.000	8.963.189.000	95,48	100,00
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.387.139.000	8.963.189.000	95,48	100,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	29.286.719.000	28.671.463.417	97,90	100,00
3	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	4.525.777.000	4.469.571.915	98,76	100,00
	Perencanaan, Penganggaran,	25.000.000	23.877.700	95,51	100,00

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi		
			Keuangan		Fisik
			Rp.	%	%
	dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.723.596.000	2.721.096.126	99,91	100,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	151.700.000	150.050.000	98,91	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	626.878.000	610.953.702	97,46	100,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175.000.000	163.000.000	93,14	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	362.930.000	345.090.633	95,08	100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	460.673.000	455.503.754	98,88	100,00
4	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	75.000.000	74.990.000	99,99	100,00
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	25.000.000	24.990.000	99,96	100,00
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	100,00	100,00
5	<b>Program</b>	1.437.933.000	1.414.060.000	98,34	100,00

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi		
			Keuangan		Fisik
			Rp.	%	%
	<b>Kawasan Permukiman</b>				
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	100.000.000	98.482.000	98,48	100,00
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	50.000.000	49.372.000	98,74	100,00
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.287.933.000	1.266.206.000	98,31	100,00
6	<b>Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh</b>	7.500.000.000	7.493.239.000	99,91	100,00
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	7.500.000.000	7.493.239.000	99,91	100,00
7	<b>Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)</b>	15.748.009.000	15.219.602.502	96,64	100,00
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	15.748.009.000	15.219.602.502	96,64	100,00
	Urusan Pemerintahan	250.000.000	244.715.000	97,89	100,00

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi		
			Keuangan		Fisik
			Rp.	%	%
	Bidang Pertanahan				
8	<b>Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan</b>	50.000.000	46.905.000	93,81	100,00
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	46.905.000	93,81	100,00
9	<b>Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee</b>	100.000.000	98.890.000	98,89	100,00
	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	98.890.000	98,89	100,00
10	<b>Program Penatagunaan Tanah</b>	100.000.000	98.920.000	98,92	100,00
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	98.920.000	98,92	100,00

## B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

## 1. PERMASALAHAN

Meskipun secara umum pencapaian indikator tujuan, indikator sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan serta indikator kinerja utama yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021 sd 2026 yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan menunjukkan pencapaian yang positif akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat dinamika permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian indikator tersebut di atas.

Adapun permasalahan yang di hadapi adalah sebagaimana berikut :

- 1) Tidak berjalannya mekanisme perencanaan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta munculnya *conflict of interest* dalam penyusunan perencanaan kegiatan.
- 2) Keterbatasan ketersediaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan urusan perumahan rakat dan kawasan permukiman.
- 3) Keterbatasan kapasitas manajerial dalam pelaksanaan urusan perumahan rakat dan kawasan permukiman, sehingga sulitnya pencapaian sinkronisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan terkait dengan urusan perumahan rakat dan kawasan permukiman.
- 4) Rendahnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan urusan perumahan rakat dan kawasan permukiman.
- 5) Masih kurangnya jumlah SDM Aparatur yang menangani urusan perumahan rakat dan kawasan permukiman.
- 6) Terbatasnya lahan murah untuk pembangunan perumahan, terbatasnya akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak, masih

lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan perumahan dan masih rendahnya efisiensi dalam pembangunan perumahan.

- 7) Menurunnya kualitas lingkungan permukiman dan meningkatnya luasan kawasan kumuh, belum memadainya prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman, menurunnya daya dukung lingkungan perumahan dan permukiman, belum terintegrasinya pengembangan kawasan perumahan dengan pembangunan prasarana dan sarana kawasan serta lemahnya pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman.
- 8) Rendahnya peningkatan pelayanan air bersih di perkotaan dan perdesaan serta khususnya untuk penduduk miskin dan daerah kekeringan serta pelayanan air bersih non perpipaan (sebagian besar di perdesaan) belum teridentifikasi secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan kondisi air yang dikonsumsi secara mandiri.
- 9) Masih terbatasnya pelayanan pengolahan sistem air limbah terpusat (sistem sewerage) di perkotaan, serta belum memadainya pelayanan sanitasi yang hal itu akan dapat memberikan kontribusi pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah.
- 10) Tidak berfungsinya saluran drainase sebagai pematus air hujan, hal ini disebabkan antara lain karena masyarakat membuang sampah ke saluran drainase, akibat dari rendahnya penegakan hukum khususnya dalam perambahan badan air termasuk saluran drainase di kawasan perkotaan, belum optimalnya peraturan dan standar pengelolaan drainase. belum memadainya sistem dan pendanaan untuk pemeliharaan drainase

serta belum terpadunya kerjasama antar instansi terkait maupun antar pemerintah daerah dalam penanganan drainase khususnya pengurangan luas daerah genangan atau banjir

## **2. SOLUSI**

- 1) Fasilitasi peningkatan intensitas koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan urusan perumahan rakat dan kawasan permukiman.
- 2) Diusulkan penambahan ketersediaan anggaran guna pelaksanaan kegiatan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- 3) Peningkatan kapasitas sumber daya organisasi
- 4) Fasilitasi secara berkesinambungan koordinasi dengan masyarakat terkait urusan perumahan rakat dan kawasan permukiman.
- 5) Mengusulkan penambahan jumlah SDM/ staf teknis untuk pengelolaan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- 6) Peningkatan pemenuhan rumah layak huni bagi seluruh masyarakat khususnya MBR serta Pembangunan Rusunawa.
- 7) Upaya penataan lingkungan dan pemenuhan sarana prasarana di kawasan permukiman.
- 8) Meningkatkan peran serta seluruh stakeholder dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air bersih di perkotaan dan perdesaan, menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk berperan serta dalam meningkatkan pelayanan air bersih untuk masyarakat, mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan air bersih sebagai upaya meningkatkan efisiensi pelayanan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam (air baku) serta meningkatkan kinerja pengelola air minum melalui restrukturisasi kelembagaan.

- 9) Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk berperan serta dalam meningkatkan pelayanan Air Limbah yang layak untuk masyarakat, dan meningkatkan kualitas SDM pengelola pelayanan Air Limbah yang layak.
- 10) Kerjasama antar instansi terkait maupun antar pemerintah daerah dalam penanganan drainase.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2022, target kinerja telah tercapai sebagaimana rencana yang telah ditetapkan, namun demikian masih perlu adanya perbaikan/penyempurnaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pada masa mendatang. Untuk menunjang peningkatan kinerja pada kegiatan/rutinitas perlu didukung sarana dan prasarana mobilitas yang proposional yang didasarkan pada analisa kebutuhan minimal.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan LKjIP Pemerintah Kabupaten Grobogan.

# **LAMPIRAN**

## 1. Perjanjian Kinerja

### **PERJANJIAN KINERJA**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN 2022**



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN GROBOGAN**

Jl. Dr. Sutomo No. 10 Purwodadi, Grobogan  
Telp. (0292) 5140756 Faks. (0292) 422012  
Email : [dperakim.grobogan@gmail.com](mailto:dperakim.grobogan@gmail.com)  
Website : [disperakim.grobogan.go.id](http://disperakim.grobogan.go.id)

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN GROBOGAN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

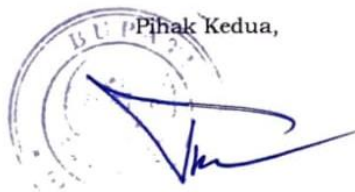
Nama : Drs. SISWANTO, M.M  
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Kab. Grobogan  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SRI SUMARNI, S.H, M.M  
Jabatan : Bupati Grobogan  
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwodadi, Januari 2022

Pihak Kedua,  
  
SRI SUMARNI, S.H, M.M

Pihak Pertama,  
  
Drs. SISWANTO, MM  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19640618 199403 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN GROBOGAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya rumah layak huni dan kualitas lingkungan permukiman	Persentase rumah layak huni	63,16%
		Persentase kawasan kumuh	0,054%
2	Meningkatnya pemenuhan akses air minum dan air limbah yang layak dan aman	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/ kota	86,20%
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik	78,57%
3	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Persentase lahan PSU yang sudah diserahkan pengembang ke Pemda yang disertifikatkan	7,69%
4	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang	Nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai 70

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN GROBOGAN**

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum	Rp 7.656.964.000	APBD
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 9.195.139.000	APBD
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.695.375.000	APBD
4	Program Pengembangan Perumahan	Rp 75.000.000	APBD
5	Program Kawasan Permukiman	Rp 1.252.383.000	APBD
6	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp 7.500.000.000	APBD
7	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp 14.769.637.000	APBD
8	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Rp 50.000.000	APBD
9	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Rp 100.000.000	APBD
10	Program Penatagunaan Tanah	Rp 100.000.000	APBD
	Jumlah	Rp 45.394.498.000	APBD

BUPATI GROBOGAN,

SRI-SUMARNI, S.H, M.M

Purwodadi, Januari 2022  
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN GROBOGAN

Drs. SISWANTO, MM

Penata Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19640618 199403 1 005

## **2. Perjanjian Kinerja Perubahan Kedua**

**PERUBAHAN KEDUA  
PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN 2022**



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN GROBOGAN  
Jl. Dr. Sutomo No. 10 Purwodadi – grobogan , 58111  
Telp (0292)5140756 Fax (0292) 422012  
Email : [dperakim.grobogan@gmail.com](mailto:dperakim.grobogan@gmail.com)  
Website : [disperakim.grobogan.go.id](http://disperakim.grobogan.go.id)**

**PERNYATAAN PERUBAHAN KEDUA PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN GROBOGAN**



**PERUBAHAN KEDUA  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, serta telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. SISWANTO, M.M  
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Kab. Grobogan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SRI SUMARNI, S.H, M.M  
Jabatan : Bupati Grobogan


Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwodadi, Oktober 2022

Pihak Kedua,

  
SRI SUMARNI, S.H, M.M

Pihak Pertama,

  
Drs. SISWANTO, MM  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19640618 199403 1 005

**PERUBAHAN KEDUA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN GROBOGAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi s.d Semester I	Target s.d Akhir Tahun 2022
1	Meningkatnya rumah layak huni dan kualitas lingkungan permukiman	Persentase rumah layak huni	63,01%	63,16%
		Persentase kawasan kumuh	0,056%	0,054%
2	Meningkatnya pemenuhan akses air minum dan air limbah yang layak dan aman	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/ kota	85,30%	86,20%
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik	77,06%	78,57%
3	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Persentase lahan PSU yang sudah diserahkan pengembang ke Pemda yang disertifikatkan	0,000%	7,692%
4	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang	Nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai 70,20	Nilai 70

	Program	Anggaran	
		Penetapan/Diperjanjikan	Perubahan Kedua
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum	Rp 7.656.964.000	Rp 7.271.748.000
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 9.195.139.000	Rp 9.387.139.000
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.695.375.000	Rp 4.522.163.000
4	Program Pengembangan Perumahan	Rp 75.000.000	Rp 75.000.000
5	Program Kawasan Permukiman	Rp 1.252.383.000	Rp 1.437.933.000
6	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp 7.500.000.000	Rp 7.500.000.000
7	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp 14.769.637.000	Rp 15.748.009.000
8	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000
9	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000
10	Program Penatagunaan Tanah	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000
	Jumlah	Rp 45.394.498.000	Rp 46.191.992.000

BUPATI GROBOGAN,  
  
SRI SUMARNI, S.H. M.M

Purwodadi, Oktober 2022  
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN GROBOGAN  
  
SISWANTO, MM  
Pibina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19640618 199403 1 005

### 3. Capaian Air Minum

DATA CAKUPAN LAYANAN AIR MINUM KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	Penduduk (Jiwa)	JUMLAH KK (Jiwa)	PDAM (Jiwa)	DAK (Jiwa)	Pamsimas (Jiwa)	Lainnya (Jiwa)	Total Layanan Perpipaan (Jiwa)	Air Minum Layak (Perpipaan)	BJP Layak (Jiwa)	Total BJP (Jiwa)	Akses Air Minum (Jiwa)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	15
1	Brati	51.478	17.879	10.645	1.210	4595	1840	18.290	18.290	33.416	33.416	51.706
2	Gabus	75.316	26.970	2.255	3.520	4175	500	10.450	10.450	64.948	64.948	75.398
3	Geyer	60.222	20.074	4.585	1.960	1780	140	8.465	8.465	12.252	12.252	20.717
4	Godong	88.781	31.004	4.390	3.520	13883	2185	23.978	23.978	61.057	61.057	85.035
5	Grobogan	79.569	27.347	3.660	2.260	6644	490	13.054	13.054	57.234	57.234	70.288
6	Gubug	86.448	29.210	1.550	2.325	17744	2375	23.994	23.994	66.843	66.843	90.837
7	Karangrayung	102.991	35.839	745	2.640	10950	3070	17.405	17.405	63.761	63.761	81.166
8	Kedungjati	44.929	15.467		200	3473	500	4.173	4.173	24.544	24.544	28.717
9	Klambu	39.287	15.460	675	3.330	4008	1620	9.633	9.633	24.429	24.429	34.062
10	Kradenan	84.589	29.738	5.835	2.970	3646		12.451	12.451	73.503	73.503	85.954
11	Ngarangan	71.065	25.207	3.215	900	4700	420	9.235	9.235	27.485	27.485	36.720
12	Penawangan	66.368	23.440	4.640	1.690	8557		14.887	14.887	29.275	29.275	44.162
13	Pulokulon	111.957	39.403	8.270	1.920	2521		12.711	12.711	68.923	68.923	81.634
14	Purwodadi	141.973	49.569	95.095	700	986		96.781	96.781	84.266	84.266	181.047
15	Tanggungharjo	42.698	14.716	5.210	1.050	2451		8.711	8.711	28.794	28.794	37.505
16	Tawangharjo	58.844	13.199	5.970	1.810	4196	3260	15.236	15.236	45.638	45.638	60.874
17	Tegowanu	58.512	20.230	11.320	920	10577	1540	24.357	24.357	25.772	25.772	50.129
18	Toroh	119.622	42.910	14.310	3.910	5559	500	24.279	24.279	83.315	83.315	107.594
19	Wirosari	94.837	33.422	5.625	2.730	8950	750	18.055	18.055	40.902	40.902	56.957
<b>JUMLAH</b>		1.479.506	511.084	187.995	39.565	119395	19190	366.145	366.145	916.357	916.357	1.282.502
<b>Prosentase</b>												
$= \frac{366.145 + 916.357}{3}$												
$= 427.501 \text{ Rumah Tangga}$												

Keterangan :

jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di Kabupaten Grobogan

$$= \frac{366.145 + 916.357}{3}$$

$$= 427.501 \text{ Rumah Tangga}$$

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan



Drs. SISWANTO, MM  
NIP. 19640618 19403 1 005

#### 4. Capaian Air Limbah

### DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GROBOGAN

Jl. Dr. Sutomo No.10 Purwodadi-Grobogan

Kode Pos :58111, Telepon : 0292-5140756, Faksimile0292-422012, Email : dperakim.grobogan@gmail.com

#### CAKUPAN LAYANAN SANITASI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH SD	JUMLAH DUSUN	JUMLAH KK	AKSES JSP	AKSES JSSP	AKSES SHARING	AKSES OD	% AKSES JSP	% AKSES JSSP	% AKSES SHARING	% AKSES OD	JUMLAH RUMAH AKSES SANITASI LAYAK 2022
1	KECAMATAN BAAKI	37	53	17548	13541	1724	2283	0	77,17	9,82	13,01	0	14682,5
2	KECAMATAN GABUS	46	95	22746	11341	9931	2726	0	49,86	43,66	0,99	0	11454
3	KECAMATAN GREYER	48	94	24089	16782	5384	2423	0	67,59	22,35	10,06	0	17493,5
4	KECAMATAN GODOG	56	93	28962	24653	3006	1303	0	85,12	10,38	4,50	0	25304,5
5	KECAMATAN GROBOGAN	53	61	23651	12497	6279	4875	0	52,84	26,55	20,61	0	14934,5
6	KECAMATAN GUBUS	51	57	23944	20147	2453	1344	0	84,14	10,24	5,61	0	20819
7	KECAMATAN KARANGRAYUNG	67	103	34396	20647	8794	5455	0	60,03	24,11	15,86	0	23374,5
8	KECAMATAN KEDUNGIATI	34	58	15072	9406	2363	3303	0	62,41	15,68	21,91	0	11057,5
9	KECAMATAN KLAMBU	28	36	13298	11981	714	603	0	90,10	5,37	4,53	0	12282,5
10	KECAMATAN KRADENAN	46	75	29196	19639	7542	2015	0	67,27	25,83	6,90	0	20646,5
11	KECAMATAN NGARINGAN	38	82	23783	15809	6744	1230	0	66,47	28,36	5,17	0	16424
12	KECAMATAN PENAWANGAN	36	77	21224	15803	4866	555	0	74,46	22,93	2,61	0	16080,5
13	KECAMATAN PULOKULON	70	107	40620	26342	8953	5337	0	64,85	22,04	13,14	0	29010,5
14	KECAMATAN PURWODADI	75	86	48529	44402	1783	2344	0	91,50	3,67	4,83	0	45574
15	KECAMATAN TANGGUNGHARIC	27	44	17671	10380	927	1364	0	81,92	7,32	10,76	0	11062
16	KECAMATAN TAWANGHARIC	32	58	17829	9360	6243	2226	0	52,50	35,02	12,49	0	10473
17	KECAMATAN TEGOWANU	33	50	15172	10128	3458	1586	0	66,75	22,79	10,45	0	10921
18	KECAMATAN TOROH	70	118	40029	34106	2702	3221	0	85,20	6,75	8,05	0	35716,5
19	KECAMATAN WIROSARI	49	68	31687	26965	2519	2323	0	85,10	7,95	7,33	0	28126,5
<b>KABUPATEN GROBOGAN</b>		<b>896</b>	<b>1415</b>	<b>484446</b>	<b>353429</b>	<b>85885</b>	<b>44016</b>	<b>0</b>	<b>72,96</b>	<b>17,73</b>	<b>9,09</b>	<b>0</b>	<b>375437</b>
<b>AKSES SANITASI LAYAK KABUPATEN GROBOGAN</b>		<b>77,50</b>											
<b>AKSES SANITASI DASAR KABUPATEN GROBOGAN</b>		<b>22,27</b>											



Drs. SISWANTO, MM.  
Nip. 19630618 199403 1 005

## 5. Capaian Penanganan Kumuh

**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jl. Dr. Sutomo No.10 Purwodadi – Grobogan 58111  
Telp. (0292) 5140756 Fax. (0292) 422012

**LUAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN 2022**

NO	SK BUPATI NOMOR 050/921/2020 TANGGAL 22 DESEMBER 2020		Luas Kumuh Awal (Ha)	Capaian Pengurangan Kumuh Akhir 2021 (Ha)	Capaian Pengurangan Kumuh Akhir 2022 (Ha)	Sisa Luasan Kumuh Akhir Tahun 2022 (Ha)	Keterangan
	Kecamatan	Desa/Kelurahan					
1	Purwodadi	Genusuran	6,36	4,18	0	2,18	
2	Purwodadi	Kalongan	18,95	5,02	0	13,93	
3	Purwodadi	Karanganyar	3,72	0	3,72	0	
4	Purwodadi	Kuripan	22,68	7,57	0	15,11	
5	Purwodadi	Nambuhan	15,47	12,19	0	3,28	
6	Purwodadi	Nglobar	1,74	1,74	0	0	
7	Purwodadi	Ngraji	5,58	0	4,71	0,87	
8	Purwodadi	Pulorejo	8,25	4,02	0	4,23	
9	Purwodadi	Purwodadi	24,2	3,46	0	20,74	
10	Purwodadi	Danyang	9,83	2,18	0	7,2	
11	Purwodadi	Warukaranganyar	4,01	0	1,63	2,38	
<b>Jumlah</b>			<b>120,79</b>	<b>40,36</b>	<b>10,06</b>	<b>69,92</b>	

Kepala Dinas  
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Grobogan



Drs. SISWANTO, MM  
NIP. 19640618 199403 1 005

## 6. Capaian Peningkatan PSU dan Rumah Layak Huni

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
 Jl. Dr. Sutomo No. 10 Purwodadi - Grobogan 58111  
 Telp. ( 0292 ) 5140756 Fax ( 0292 ) 422012



### PROGRAM/ KEGIATAN BIDANG PERUMAHAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2017-2022

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	Sasaran dan Lokasi	Jumlah Penerima Th.2017	Jumlah Penerima Th.2018	Jumlah Penerima Th.2019	Jumlah Penerima Th.2020	Jumlah Penerima Th.2021	Jumlah Penerima Th.2022	Jumlah	Keterangan	Sumber Dana
1	2	3	4	5	5						6	7
1	Berkaspermendes RT/ Lh	Penggiatan RT/ Lh 3 unit per desa untuk seluruh desa di Program Jarak Tengah	Sekolah Desa di Kab Grobogan (2018-2019)	168 unit	705 unit	819 unit	453 unit	503 unit	3.101 unit		th 2017-14 2020 @ Rp 10.000.000,- th 2021-2022 @ Rp. 12 jt	APBD Propinsi
2	Bantuan Simulasi Perumahan Swadaya (BSPS)	Bantuan Simulasi Peningkatan Kualitas RT/ Lh bagi MBR	Desa zona merah dan kuning (2020)		352 unit	700 unit	758 unit	495 unit	764 unit	3.069 unit	@ Rp 17.500.000,- @ Rp 15.000.000,- (2018) @ Rp 17.500.000,- (2019-2020)	APBN
3	Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan Permukiman	Peningkatan Kualitas RT/ Lh untuk Program Kozaku	Kawasan kumuh perkotaan		177 unit	96 unit	103 unit	63 unit	50 unit	529 unit		APBN
4	Bantuan Bisnis Jaring	Bantuan RT/ Lh Baznas	Desa Program TMMD Regular (2017)	10 unit			19 unit		3 unit	32 unit	@ Rp. 15.000.000,- (2018) @ Rp 17.500.000,- (2019-2020)	Bantuan Prov Jaring
5	CSR Bank Jaring	Program CSR RT/ Lh Bank Jaring	Desa dengan zona merah 5 desa penerima		75 unit				97 unit	172 unit	20 jt @ 8 Bulan (2022) @ Rp 15.000.000,-	CSR
6	Pembangunan Baru Disperkim Propinsi Jarak Tengah	Program Pembangunan Rumah Baru	Desa dengan backlog kepemilikan rumah				15 unit			15 unit	@ Rp 35.000.000,-	Diserahkan Prop Jaring
7	Program Pengembangan Perumahan	Penetapan Kebijakan Strategis dan Program Perumahan	Pendirian Perumahan Output 1 Bk Stipulan									APBD Kabupaten Grobogan
8	APBD Kab. Grobogan	Peningkatan Kualitas RT/ Lh	Desa di Kabupaten Grobogan	178 unit	1.309 unit	1.615 unit	1.388 unit	1.011 unit	1.893 unit	7.394 unit	476 unit @ Rp 15.000.000,- @ Rp 15.000.000,-	APBD Kabupaten Grobogan
<b>Jumlah</b>				178 unit	1.309 unit	1.615 unit	1.388 unit	1.011 unit	1.893 unit	7.394 unit		

**Keterangan:**

Jumlah unit RT/ Lh Kabupaten Grobogan berdasarkan PBDT 2015  
 Jumlah penganggaran RT/ Lh oleh Disperkimdes Tahun 2017-2021  
 Jumlah penganggaran RT/ Lh oleh Disperkim Tahun 2017-2022  
 Total jumlah penganggaran RT/ Lh Tahun 2017-2022 (1.890 - 7.394)  
 Jumlah unit RT/ Lh Kabupaten Grobogan (107.657 - 9.284)



Drs. SOWANTO, MM

Bint. 19030613 199003 1 005